

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya dasar desentralisasi telah menyemarakkan fenomena politik di peringkat tempatan, bermula daripada kelahiran elit tempatan sehingga lahirnya raja-raja kecil di peringkat tempatan. Kedua-dua elit negara dan elit perundangan menggunakan kewangan serantau untuk mengekalkan pelanggan (orang bawahan) atau klon. Dengan memanipulasi badan pembuat keputusan politik di peringkat tempatan, golongan elit mengarahkan agensi negara sedemikian rupa sehingga keputusan politik memberi manfaat kepada mereka dan rakan sebaya mereka. Kesan daripada fenomena politik tempatan ini diwakili oleh pemimpin perniagaan dan orang-orang berpengaruh tempatan yang kemudiannya akan menjadi pegawai. (Leo Agustino, 2011).

Kewujudan kumpulan pihak berkuasa tempatan elit tempatan adalah buah daripada dasar desentralisasi. Kelahiran penduduk tempatan dalam sesebuah kelompok masyarakat pastinya akan menentukan keputusan yang dimulakan oleh wilayah tersebut. Kebijakan desentralisasi merupakan peluang pelaksanaan pemerintahan daerah, kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah. Terdapat desentralisasi tentunya akan membuat peluang baru bagi sebagian aliansi politik terutama dalam hal ide dan aras politik dimana hal ini bukanlah halangan yang dapat menyumbat berbagai kepentingan di aras lokal. Adanya beberapa orang kuat

lokal ialah disebabkan oleh beberapa tahun silam ketika orde baru masih eksis keberadaannya di Indonesia (Hadiz,2010)

Fenomena orang lokal dalam sistem politik di indonesia ialah lahirnya beberapa kekuatan loka yang berpengaruh terhadap konstelasi pemilihan kepala desa. Istilah pemilihan pilkades merupakan istilah yang sering didengar dan diperkatakan oleh masyarakat umum khususnya di negara-negara demokrasi masa kini khususnya parti politik dan ahli politik. Pemilihan ketua negara berkait rapat dengan kehidupan negara, dan kelak akan menjadi penggerak kepada kesejahteraan masyarakat negara. (UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Wilayah perdesaan ialah struktur terendah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat yang berbeda profesi, golongan, kepentingan dan masalah sosial yang berbeda. Maka dari itu dapat kita lihat bahwasannya desa berjalan sebagaimana mestinya tentunya berdampak sangat kuat pada upata pembangunan dan pemberdayaan di berbagai sektor masyarakat.

Disahkannya SK Nomor 72 tentang Desa pada tahun 2005 membuat sistem baru pemilihan kepala desa, tidak dapat disangkal partisipasi pemerintah daerah khususnya dalam demokrasi yang berjalan di desa akan memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan. Dari kehidupan yang demokratis dan ditingkatkani. (Sumodinigrat 2016: 14).

Proses pemilu pada tingkatan wilayah desa atau yang biasa kita sebut dengan istilah Pilkades ialah salah satu wujud praktik dari kegiatan kehidupan

keterbukaan yang dilangsungkan di aras desa. Praktik kegiatan politik sangat penting untuk memprioritaskan kegiatan pemilu. Proses pemilu menganut tiga aspek penting: persaingan antar calon, partisipasi, dan kebebasan (Yuningsih dan Subekti, 2016). Aspek kompetitif terkait dengan calon yang berkenan merubut kursi nomor 1 di desa mereka serta cara mereka memperoleh kekuasaan tersebut.

Sudut Pandang partisipatif model konsensus politik dengan calon kepala desa terkait persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, terutama cara menentukan bakal calonnya. Aspek kebebasan terkait erat dengan suasana pemilih dalam mengambil keputusan politik bagi calon penguasa desa.

Mempertimbangkan tiga aspek penting dari proses pemilihan kepala desa, diharapkan praktik demokrasi langsung dapat dilaksanakan melalui kelembagaan, proses pemilihan, dan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa yang berhasil dapat dikatakan berhasil jika tiga kemungkinan aspek dari proses pemilihan tersebut dipertimbangkan dengan matang.

Namun, mengikut fakta setakat ini, pelaksanaan pertikaian politik di Indonesia melibatkan banyak amalan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebijakan moneter (*monetary policy*), kambing hitam (*parties to menyalahkan*), dan perjudian. pernah. Ini memberi kesan kepentingan yang tidak bertanggung jawab, kampanye hitam rahsia tapi biasa-biasa saja yang dijalankan oleh parti-parti.

Penjelasan di atas memberikan gambaran abstrak tentang efek

partisipasi pemangku kepentingan yang dapat mengelola pemilu dalam sistem kampanye hitam publik. Orang kuat lokal adalah orang kuat yang lahir secara lokal dari kemahirannya untuk mengelola sumber daya seperti kekayaan dan kepemilikan tanah. Ini pada dasarnya mengarah pada legitimasi orang misteriusnya melalui pakaian, kebutuhan dasar, hubungan sosial, penyediaan dan jaminan perlindungan. Di depan sekelompok atau sekelompok orang yang berjejaring dan pada akhirnya dapat dikendalikan oleh kontrol yang tepat. (Lambach, 2004)

Dalam sejarahnya kepemimpinan Desa pada Jawa tidak sanggup tanggal menurut penguasaan Kebijakan sponsorship adalah jaringan hubungan yang kuat. Kebijakan desa diteruskan oleh pemerintah orde baru sejak zaman kolonial/kolonial, meninggalkan feodal, tribal (didominasi oleh jaringan keluarga elit), dan seringkali pemimpin desa yang oligarki. Warisan kepemimpinan di desa lama setidaknya didasarkan pada dua hal. Orang-orang dengan kekuasaan elit / kekuasaan lokal melalui budaya ayah, kepemimpinan birokrasi konservatif politik relasi. (Institute For Research and Empowerment, 2017).

Penelitian (Ratnasari Paraisu, 2016) Pemilihan kepala desa menjelaskan bahwa ini adalah demokrasi tingkat diharapkan oleh masyarakat lokal Elite politik lokal. Kehadiran orang-orang berpengaruh lokal dan pengaruh kepala suku seperti Mambri sangat kuat. Intervensi dari orang-orang lokal yang berpengaruh sangat kuat dalam mengangkat kepala desa untuk berjuang dalam perjuangan politik lokal. Hasil kajian menjelaskan bahwa kekuatan Mambri

sebagai tokoh lokal berpengaruh besar pengaruhnya terhadap pilihan pemimpin lokal. Berdasarkan penelitian (Argenti, 2018) Influencer lokal adalah orang tua dengan sumber daya tidak terbatas. Penduduk lokal yang berpengaruh memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisi sentral dalam masyarakat. Bahkan jika mereka tidak dapat memegang posisi penting ini, mereka mencoba memastikan bahwa politik lokal mendukung bantuan mereka.

Penelitian (Solissa, 2016) ia menjelaskan, warga lokal yang kuat adalah aktor yang semula dianggap sebagai masyarakat adat yang menjadi warga lokal yang kuat bagi pemimpin lokalnya. Dalam penelitian Solissa membedakan local strongman menjadi dua bagian berdasarkan teori Migdal dan teori John T. Sidel, Migdal Penduduk asli yang kuat mengklaim berasal dari pemimpin suku, pemilik tanah, pemimpin adat, dll. dan Sidel mengklaim bahwa penduduk asli yang kuat berasal dari pemimpin distrik, anggota dewan, pengusaha, dll. Bersikeras. Dalam penelitian (Sidel, 2005) Dia menjelaskan bahwa orang-orang lokal yang berpengaruh tidak serta merta mencerminkan kebutuhan masyarakat, mereka hanya ingin mendapatkan kekuatan yang layak mereka dapatkan. Bahkan, orang-orang berpengaruh lokal terlalu kuat untuk menunjuk pemimpin lokal untuk mempertahankan posisi strategis mereka di pemerintah daerah karena pengaruh orang-orang berpengaruh lokal..

Dalam penelitian lain (Minan, 2015) Orang-orang berpengaruh lokal menjelaskan bahwa mereka adalah aktor Tingkat lokal yang memiliki dampak yang sangat kuat bagi kehidupan masyarakat. Orang-orang berpengaruh di daerah bertindak sebagai elit daerah dari struktur sosial, penguasa, da'i,

pemersatu, pengganda, da'i idealis dan mediator politik. Hasil penelitian Minan menunjukkan bahwa orang-orang berpengaruh lokal bertindak sebagai aktor sosial, terutama mereka yang berfungsi dalam struktur sosial dengan pemimpin agama dan pengusaha. Aktor sosial tidak hanya bisa menjadi aktor politik, tetapi juga orang kuat lokal. Munculnya orang-orang berpengaruh di daerah merupakan akibat dari kebijakan desentralisasi. Ditandai dengan kuatnya pengaruh orang-orang berpengaruh lokal yang mendukung calon legislatif.

Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah mengatur tata cara dan mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, termasuk bagi Desa Cilampunghilir. Pemilihan kepala desa diharapkan dapat menjadi alat untuk membentuk pemerintahan yang modern dan demokratis dengan mampu memilih dan mengangkat pemimpin daerah yang dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat serta memajukan masyarakat.

Meskipun seluruh proses pemilihan kepala desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan pemilihan kepala desa H. Deni menyisahkan fenomena. Peran besar dari Local Strongman yang dapat mempengaruhi setiap tindak-tanduk lembaga struktural pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Cilempunghilir Pada Tahun 2019, pengaruh orang kuat lokal dilakukan mulai dari pemilihan bakal calon kepala desa yang memiliki hubungan darah/kekerabatan dengan orang kuat lokal, sehingga bakal calon dipastikan memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat. Kekuatan politik

juga dibangun lewat aktivitas ekonomi melalui pemberian bantuan sembako bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang merasa kecewa karena calon yang didukungnya kalah dalam konstelasi pesta demokrasi 2019, mengatakan bahwa “Ya ada indikasi adanya dukungan dari beberapa pengusaha di Desa ini terhadap salah satu calon, selain itu juga ada indikasi bagi-bagi sembako waktu pilkades kemarin” (Wawancara, dengan Bapak EF, 25 Januari 2021).

Dari data awal yang peneliti peroleh dari pihak Desa Cilampungilir, proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cilampungilir dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 dengan diikuti oleh lima calon yakni Bapak Zeni, Bapak Bambang, Bapak H. Deni, Bapak Bowo dan Bapak Yadi dengan hasil perolehan suara dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perolehan Suara Pilkades Cilampungilir Tahun 2019

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Zeni	695
2	Bambang	1503
3	H. Deni	1789
4	Bowo	421
5	Yadi	322
Jumlah Suara Sah		4.730

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak H. Deni (Februari, 222)

Maka dibandingkan dengan tabel diatas kontribusi suara yang dimiliki oleh H. Deni dan kontribusi hasil Bambang selaku Petahana hanya berbeda 200 saja, dalam hal ini H. Deni dengan nilai 1789 padahal Bambang dengan 1503. Adanya perbedaan yang tipis 200 ini juga dilihat dari total pemilih sebanyak 4.730 yang sah dan bertentangan pendapat dengan orang kuat lokal ini juga

terbagi pada beberapa calonnya lainnya yaitu calon urut 1,2, 4 dan 5. Tidak dapat disangkal bahwa mereka yang menentang "orang kuat lokal" dapat bersatu melalui perjuangan politik dan hanya mencalonkan satu kandidat untuk mengalahkan mereka yang tidak mendukung orang kuat lokal..

Adanya demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan, sehingga kesenjangan suara sangat kecil, dengan hanya 200 suara antara calon kepala desa ke-2 dan ke-3 dan banyak pertanyaan tentang hasil itu. Ini akan menjadi studi yang menarik karena akan dilempar. Pemimpin ini, yang perlu anda lihat adalah gambaran pemimpin, kandidat, kekuatan pengaruh orang lokal dalam konstelasi pemilihan kepala desa.

Dari pada itu, penulis melakukan kajian dengan judul sebagai berikut karena dimungkinkan untuk mengetahui kekuatan politik orang kuat lokal dalam persaingan politik lokal. “Kekuatan Politik *Local Strongman* Pada Kontestasi Pilkades Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan latar belakang masalah diatas, maka dapat diuraikan bahwasanya rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Politik *Local Strongman* Pada Kontestasi Pilkades Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibuatkan batasan masalah dengan tujuan penulis bisa fokus pada pembahasan yang diajukan dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dalam skripsi, Penelitian ini dibatasi hanya pada ruang lingkup tentang Peran *Local Strongman* Dalam Kemenangan H. Deni pada Pilkada di Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan politik pribumi yang kuat pada saat kemenangan. H. Deni pada Pilkada Tahun 2019 di Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

- Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis secara praktis maupun teoritis terutama yang berkaitan dengan peran orang kuat lokal dalam kegiatan pemilihan desa
- Untuk memberikan sumbangan ilmiah, sebagai bahan masukan khususnya terhadap pemerintah desa cilampungilir.
- Hasil kegiatan riset ini tentunya dapat berguna dalam menambah bahan kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya.